

FRAUD DIAMOND TERHADAP FINANCIAL STATEMENT FRAUD

Oleh :

Zulham Al Farizi¹⁾

Politeknik Negeri Pontianak

Email : *Farizi85@gmail.com*

Tashadi Tarmizi²⁾

Politeknik Negeri Pontianak

Susan Andriana³⁾

Politeknik Negeri Pontianak

Info Artikel :

Diterima : 21 Feb 2020

Direview : 25 Maret 2020

Disetujui : 15 Mei 2020

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of diamond fraud on financial statement fraud: an empirical study in the west kalimantan province, both partially and simultaneously. Fraud can occur in every country with different types and frequencies, because there are still potential risks of corruption in the political system that hasn't change. In addition, there are indications of suspicious relation between politicians and business people who explain that bribery and corruption are still present in the indonesian political system.

Fraud Diamond's research results on the financial statement fraud: empirical study in west kalimantan, shows that partially external presure and opportunity affect the financial statement farud, while rationalization and capability doesn't affect the financial statement fraud. In addition, simultaneously external presure, rationalization, opportunity, and capability affect the financial statement fraud of 86,4%, while the remaining 13,6% is influence by other variables not examine in this study.

Keywords : Fraud Diamond, External Pressure, Rationalization, Opportunity, Capability, Financial Statement Fraud

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fraud diamond terhadap financial statement fraud: studi empiris pada provinsi kalimantan barat, baik secara parsial dan simultan. *Fraud* dapat terjadi di setiap negara dengan jenis dan frekuensi yang berbeda – beda. Hal ini lantaran masih adanya potensi risiko korupsi dalam sistem politik yang belum berubah. Selain itu, terdapat indikasi hubungan yang mencurigakan antara politisi dan pebisnis yang menjelaskan bahwa suap dan korupsi masih hadir dalam sistem politik Indonesia.

Hasil penelitian Fraud Diamond terhadap Financial Statement Fraud : Studi Empiris pada Provinsi Kalimantan Barat, menunjukkan bahwa secara parsial External Presure dan Opportunity berpengaruh terhadap Financial Statement Fraud, sedangkan Rasionalisasi dan Capabilitas tidak mempengaruhi Financial Statement Fraud. Selain itu, secara simultan External Presure, Rasionalisasi, Opportunity, dan Capabilitas mempengaruhi Financial Statement Fraud sebesar 86,4%, sedangkan sisanya 13,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Keywords : Fraud Diamond, Tekanan, Rasionalisasi, Kesempatan, Kapabilitas, Kecurangan Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Fraud berdasarkan *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* tahun 2016 diklasifikasikan menjadi tiga jenis, yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalahgunaan aset dan korupsi. *Fraud* yang sering terjadi di Indonesia, yaitu berupa kecurangan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kecurangan berupa korupsi yang dilakukan oleh oknum di pemerintahan terkait dengan pungutan liar, penyalahgunaan anggaran yang seharusnya digunakan untuk masyarakat ternyata disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, serta berupa suap agar laporan keuangan suatu daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun berupa suap kepada anggota legislatif agar rencana anggaran untuk daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah disetujui.

Hariyanto (2017), *Indonesia Corruption Watch (ICW)* menyatakan dalam kurun waktu enam bulan terhitung mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2017 terdapat ada 226 kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Kasus korupsi yang terjadi memiliki jumlah tersangka sebanyak 587 orang dengan total kerugian negara sebesar Rp1,83 triliun. Kasus korupsi yang paling rentan terjadi, yaitu kasus korupsi yang dilakukan di lembaga pemerintah daerah dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi sebanyak 121 kasus dari total 226 kasus korupsi yang terjadi.

Kasus korupsi yang terjadi di Kalimantan Barat pada tahun 2017-2018 mengalami peningkatan kuantitas kasus korupsi, yaitu 24 dan 28 kasus korupsi dengan tingkat kerugian negara sebesar Rp4.023 miliar pada tahun 2018. Kasus korupsi dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya korupsi terjadi karena aparat yang serakah dalam pemenuhan kebutuhan, adanya kesempatan untuk menyelewengkan uang, serta *corruption by needs* yang bisa diartikan sebagai banyaknya keinginan dari pelaku untuk memenuhi keinginan pribadinya ataupun kelompok tertentu yang didasari adanya tuntutan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi secara ekonomi pelaku tidak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut sehingga memaksa pelaku untuk melakukan korupsi (Suryowati, 2019).

Permasalahan tumpang tindihnya peraturan yang mengatur birokrasi, pola pikir birokrat yang masih belum profesional, praktik operasional yang belum optimal dan fungsi pengawasan internal yang belum optimal tersebutlah yang dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Kasus kecurangan dapat

terjadi dikarenakan inspektorat daerah yang bertugas untuk mengawasi maupun membantu untuk mencegah suatu kecurangan terjadi mudah diintervensi oleh kepala daerah jika terdapat temuan-temuan pada laporan keuangan daerah yang diperiksanya.

Teori *fraud triangle* oleh Cressey (dalam tuanakota, 2012) yang menyatakan bahwa *fraud* terjadi karena adanya tekanan, kesempatan dan rasionalisasi pada pelaku *fraud*. Skousen, C.J. *et al.*, (2008) pada penelitiannya yang berjudul "*Detecting And Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness Of The Fraud Triangle And SAS No.99*", mengungkapkan bahwa stabilitas finansial, tekanan eksternal, kebutuhan finansial personal, dan pengawasan yang tidak efektif, berpengaruh signifikan dalam pendeteksian *fraud*. Teori *fraud triangle* kemudian dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) menjadi teori *fraud diamond* dengan menambahkan unsur kapabilitas dari pelaku *fraud*. Teori *fraud diamond* banyak dilakukan penelitian dan pengembangan pada sektor privat bukan pada sektor pemerintahan sehingga menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Berdasarkan paparan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini apakah *pressure* yang diprosikan dengan external pressure berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud*, apakah *opportunity* yang diprosikan dengan kelemahan SPI berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud*, apakah *rationalization* yang diprosikan dengan Opini Selain WTP berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud*, apakah *capability* yang diprosikan dengan pergantian kepala daerah berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* dan Bagaimana faktor *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability* secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud*

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan mengenai hubungan prinsipal dan agen. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Dalam hubungan keagenan, kedua belah pihak cenderung untuk memaksimalkan utilitas masing-masing maka agen tidak selalu bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Prinsipal dapat membatasi ketidaksesuaian dari keinginannya (*agency problem/conflict of interest*) dengan mengeluarkan biaya insentif dan biaya pengawasan

(*agency cost*) (Jensen & Meckling, 1976). Pada struktur pemerintahan daerah di Indonesia, hubungan keagenan dapat terjadi antara pemerintah dengan rakyat, di mana pemerintah berperan sebagai agen, dan rakyat sebagai prinsipal, yang dalam hal ini diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Memperoleh hasil evaluasi positif dari masyarakat akan memberikan tekanan tersendiri bagi Pemda, karena berdasarkan pertanggungjawaban laporan keuangan yang dibuat rakyat dapat menilai kinerja dan program kerja pemerintah telah tercapai atau belum untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian, adanya kepentingan pribadi untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun golongan tertentu dapat menyebabkan terjadinya suatu kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Adanya kesempatan yang mendukung juga akan menyebabkan terjadinya kecurangan laporan keuangan (*Financial Statement Fraud*).

Pemda dalam hal ini dipimpin oleh kepala daerah memiliki kekuasaan dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah. Apabila dalam proses tersebut inspektorat yang melakukan pemeriksaan untuk memeriksa laporan keuangan dan mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan terjadi, ternyata inspektorat tersebut mudah diintervensi oleh kepala daerah jika terdapat temuan-temuan pada laporan keuangan daerah yang diperiksanya, sehingga temuan-temuan tersebut tidak dapat dicegah terjadinya kecurangan laporan keuangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut informasi yang dihasilkan oleh pemerintah daerah memungkinkan untuk menyesatkan para pengguna laporan keuangan, sehingga akan timbul konflik antara agen dan prinsipal. (Tuinado, dkk. 2017).

Fraud

Kecurangan (*fraud*) merupakan perbuatan dan tindakan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyikan atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dan ilegal berupa uang, barang/ harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2017).

Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, *Financial Statement Fraud* atau

kecurangan laporan keuangan adalah kesengajaan dalam penyajian yang keliru mengenai kondisi keuangan dari suatu perusahaan yang dicapai melalui kesalahan penyajian yang disengaja atau sejumlah kelalaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk menipu pengguna laporan keuangan. Charles & Emma (2015) menyatakan bahwa kepatuhan entitas terhadap standar akuntansi pelaporan keuangan berpengaruh terhadap laporan keuangan yang bebas *fraud*. Laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pelaporan keuangan yang berlaku akan menghasilkan laporan keuangan yang bebas dari *fraud*.

Indikator-indikator tersebut sejalan dengan pengertian *fraud* dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Menurut Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, mengenai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyikan atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, pegawai, atau pihak ketiga.

Pemeriksa pada saat melakukan pemeriksaan harus dapat mengidentifikasi faktor risiko kecurangan dan menilai risiko adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang disebabkan oleh kecurangan (*fraud*) dan/atau ketidakpatutan (*abuse*). Risiko yang ada harus dianggap sebagai risiko yang signifikan (*significant risks*) dan pemeriksa harus memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang terkait dengan risiko tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut, disusunlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang di dalamnya termasuk kesimpulan hasil pemeriksaan. (Amrizal, 2004)

Fraud Diamond

Fraud Diamond merupakan pengembangan dari teori *Fraud Triangle* yang diperkenalkan oleh Wolfe dan Hermanson pada tahun 2004, dengan menambahkan elemen kapabilitas (*capability*) sebagai elemen keempat selain elemen tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Tekanan (*Pressure*)

Pressure adalah dorongan orang untuk melakukan *fraud* yang umum bagi perusahaan untuk memanipulasi laporan keuangannya adalah

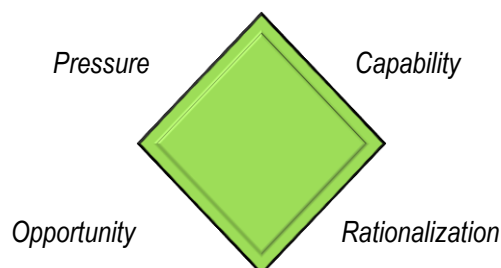
- adanya penurunan dalam prospek keuangan perusahaan. Menurut SAS No.99, terdapat empat jenis kondisi umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan. Kondisi tersebut adalah stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan individu, dan target keuangan.
2. Peluang (*Opportunity*)
Peluang adalah kondisi yang memberikan kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk menyalahsajikan laporan keuangan. Peluang dapat terjadi karena pengendalian internal yang lemah, pengawasan manajemen yang kurang baik atau melalui penggunaan posisi. Menurut SAS No.99 menyebutkan bahwa peluang pada kecurangan laporan keuangan dapat terjadi pada tiga kategori. Kondisi tersebut adalah kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan struktur organisasional.
 3. Rasionalisasi (*Rationalization*)
Skousen *et al* (2008) menyatakan Rasionalisasi merupakan bagian dari *fraud triangle* yang paling sulit diukur. Sikap dan karakter merupakan apa

yang menyebabkan satu atau lebih individu untuk secara rasional melakukan *fraud*. Menurut SAS No.99 menyebutkan bahwa rasionalisasi pada perusahaan dapat diukur dengan pergantian auditor dan opini audit.

4. Kemampuan (*Capability*)

Menurut Wolfe dan Hermanson (2004), *fraud* tidak akan terjadi tanpa adanya kapabilitas pelaku dalam memanfaatkan kelemahan pengendalian untuk tujuan melakukan dan menyembunyikan *fraud*. Penipuan tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat untuk melaksanakan setiap detail dari penipuan.

Wolfe dan Hermanson (2004) juga menyebutkan bahwa posisi seseorang dalam organisasi dapat memberikan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penipuan. Adapun sifat-sifat terkait elemen kemampuan (*capability*) dalam tindakan pelaku kecurangan yaitu: *Position/function, brains, confidence/ego, coercion skills, effective lying, immunity to stress.*



Gambar 1
Skema Fraud Diamond

External Pressure dan Financial Statement Fraud

Skousen *et all* (2008) mengatakan sumber tekanan *eksternal* salah satunya adalah dengan kemampuan perusahaan dalam membayar utang atau memenuhi persyaratan utang. Manajemen perusahaan akan merasa tertekan dengan utang yang semakin besar, karena risiko kreditnya juga akan tinggi, sehingga memungkinkan terjadinya kecurangan. Penelitian Annisya, *et all* (2016), Pamungkas (2018), menjelaskan bahwa *external pressure* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan, sedangkan penelitian Sihombing (2014), Yesiariani dan Rahayu (2017), menjelaskan bahwa *external pressure* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Maka dari itu, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : *External Pressure* memiliki pengaruh terhadap *Financial Statement Fraud*

Kelemahan Sistem Pengendalian Internal dan Financial Statement Fraud

Menurut SAS No.99 (dalam Pamungkas, 2018), pengawasan yang tidak efektif dapat terjadi terjadi karena adanya dominasi manajemen oleh satu orang atau kelompok kecil, tanpa kontrol kompensasi, tidak efektifnya pengawasan dari dewan direksi dan komite audit dalam proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal dan sejenisnya. Selain karena adanya tekanan, dalam melakukan *fraud*, pelaku *fraud* juga harus merasa bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melakukan fraud tanpa tertangkap.

Kesempatan ini dapat meningkat karena beberapa hal di antaranya, lemahnya pengendalian internal, lemahnya pelatihan, lemahnya pengawasan, dan program, kebijakan, dan prosedur anti fraud yang tidak efektif (*Association of Certified Fraud*

Examiners, 2007). Penelitian Pamungkas, 2018 menjelaskan bahwa lemahnya sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Maka dari itu, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Kelemahan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh terhadap *Financial Statement Fraud*

Opini BPK Selain WTP dan *Financial Statement Fraud*

BPK dapat memberikan beberapa opini atas laporan keuangan pemerintah daerah yang diauditnya sesuai dengan kondisi yang terjadi pada laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Opini BPK yang diberikan seperti wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas merupakan bentuk tolerir auditor atas pemerintah daerah yang memungkinkan pemerintah daerah untuk bersikap rasionalisasi atau menganggap kesalahan yang dilakukan tidaklah salah, dikarenakan telah ditolerir oleh auditor melalui paragraf penjas dalam opininya. Penelitian Annisya, *et all* (2016), Pamungkas (2018), menjelaskan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Maka dari itu, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Opini BPK selain WTP memiliki pengaruh terhadap *Financial Statement Fraud*

Pergantian Kepala Daerah dan *Financial Statement Fraud*

Komponen *capability* dalam teori *fraud diamond* oleh Wolfe & Hermanson (2004), terdapat enam komponen yaitu: *positioning, intelligence, confidence/ego, coercion skill, effective lying/deceit, dan stress management*. Para pelaku *fraud* umumnya mampu menghadapi situasi stres (*stress management*) dengan baik. Pergantian pemimpin diindikasikan mampu menggambarkan kemampuan dalam melakukan manajemen stres (*stress management*).

Selain itu, Wolfe & Hermanson (2004) juga menemukan bahwa pergantian jajaran direksi menjadi "indikasi" terjadinya *fraud*. Pergantian jajaran direksi merupakan bagian dari usaha perusahaan dalam perbaikan kinerja perusahaan akibat kurang efisien dan efektifnya kebijakan direktur sebelumnya. Pergantian direksi juga disinyalir sebagai usaha perusahaan mengeliminasi direksi yang dianggap mengetahui *fraud* yang terjadi di perusahaan. Dalam tatanan Pemerintahan Daerah, pemimpin yang dimaksud dalam hal ini adalah pemimpin pada pemerintah daerah yaitu kepala daerah. Maka dari itu, dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Pergantian Kepala Daerah memiliki pengaruh terhadap *Financial Statement Fraud*

METODOLOGI PENELITIAN

Sugiyono (2017: 39), variabel independen (variabel bebas) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat). Oleh karena itu, variabel independen dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Pressure* menurut Salman (dalam Riyani, *et all* 2017) yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan soal keuangan, perilaku *gambling*, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan ketidakpuasan kerja. Pengukuran variabel yang digunakan *External Pressure (Leverage)* yaitu dengan membagi Total Kewajiban dengan Total Aset
2. *Opportunity* menurut Priantara (dalam Riyani, *et all* 2017) adalah suatu kondisi yang memberikan kemungkinan seseorang untuk berbuat atau menempati suatu tempat pada posisi tertentu. Pengukuran variabel yang digunakan yaitu kelemahan sistem pengendalian internal (ICW) dengan melihat jumlah temuan kelemahan pengendalian internal.
3. *Rationalization* menurut Suyanto (dalam Annisya, *et all* (2016) merupakan sikap yang memperbolehkan seseorang melakukan kecurangan. Prinsip akrual berhubungan dengan pengambilan keputusan manajemen dan memberikan wawasan terhadap rasionalisasi dalam pelaporan keuangan. Pengukuran variabel yang digunakan yaitu opini BPK selain WTP (PRIOROP) yang diukur dengan variabel *dummy*. Apabila Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat mendapat opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama periode 2007-2017 maka diberi kode 1, dan apabila tidak mendapat opini selain WTP maka diberi kode 0.
4. *Capability* menurut Wolfe dan Hermanson (2004) merupakan besarnya daya dan kapasitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan *fraud* di lingkungan perusahaan, dimana perubahan direksi akan dapat menyebabkan *stress period* yang berdampak pada semakin terbukanya peluang untuk melakukan *fraud*. Penelitian ini memproksikan *capability* dengan pergantian kepala daerah

Provinsi Kalimantan Barat (CHKD) yang diukur dengan variabel *dummy*. Apabila terdapat pergantian kepala daerah selama periode 2007-2017 maka diberi kode 1, sebaliknya apabila tidak terdapat pergantian kepala daerah maka akan diberi kode 0.

Variabel dependen (variabel terikat) menurut Sugiyono (2017: 39) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Oleh karena itu, variabel dependen dalam penelitian ini yaitu *Financial Statement Fraud* yang menggunakan indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan.

Tabel 1
Data Ordinal Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini BPK	Nilai
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	1
WTP DPP (Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelas)	2
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)	3
TW (Tidak Wajar)	4
TMP (Tidak Memberikan Pendapat)	5

Sumber : Data olahan, 2019

Metode Analisis dan Uji Hipotesis **Uji Asumsi Klasik**

Sebelum melakukan analisis regresi linier, data terlebih dahulu diuji layak untuk digunakan atau tidak, yaitu dengan menggunakan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Auto Korelasi.

Analisis Regresi Berganda

Model analisis regresi berganda apabila dalam persamaan regresi tercakup lebih dari dua variabel (termasuk variabel tidak bebas). Bentuk persamaan model regresi sebagai berikut:

Uji Signifikansi Parameter Individual

Ghozali (2018:98): "Uji T pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi dependen". Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual atau parsial, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada *level of significant* 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut :

- a) Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- b) Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a) Jika $\text{sig} (\alpha) \text{ statistic} < 5\%$, maka H_1, H_2, H_3 dan H_4 diterima.

- b) Jika $\text{sig} (\alpha) \text{ statistic} > 5\%$, maka H_1, H_2, H_3 dan H_4 ditolak.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2018:97): "koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen". Jika nilai koefisien determinasi semakin tinggi, maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Untuk mengetahui tingkat ketepatan yang paling baik dapat ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi (R^2 adjusted) antara nol dan satu atau $0 < R^2 < 1$. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan keterikatannya dengan variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian data dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan menggunakan software SPSS versi 25. Penelitian ini mengenai pengaruh *fraud diamond* terhadap *Financial Statement Fraud* : Studi Empiris Provinsi Kalimantan Barat. Adapun hasil dalam penelitian ini, antara lain :

Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan uji hipotesis maka harus dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik untuk menguji data-data yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun hasil perhitungan statistik uji asumsi klasik, sebagai berikut :

Uji Normalitas

Pada uji K-S dengan uji *One Sample Kolomogorov-Smirnov* dan tingkat signifikansi 5%, adapun output SPSS, sebagai berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		OA	
N		11	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	2,45	
	Std. Deviation	1,508	
Most Extreme Differences	Absolute	,196	
	Positive	,196	
	Negative	-,167	
Test Statistic		,196	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,725 ^e	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,713
		Upper Bound	,736
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan Tabel diatas hasil uji Normalitas dengan menggunakan SPSS versi 25 dapat diperoleh nilai Test Statistic sebesar 0,196 dan nilai signifikansi (2-tailed) pada 0,200 lebih besar dari 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi Normal.

Uji Multikolinearitas

Pengujian Multikolinearitas dalam penelitian ini berdasarkan nilai Tolerance dan VIF pada variabel bebas (*Independent Variabel*). Adapun output SPSS dalam pengujian Multikolinearitas, antara lain :

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan	
	Tolerance	VIF		
1	(Constant)			
	EP	,626	1,599	Tidak terjadi multikolinearitas
	SPI	,445	2,248	Tidak terjadi multikolinearitas
	NWTP	,433	2,309	Tidak terjadi multikolinearitas
	PKD	,418	2,391	Tidak terjadi multikolinearitas
a. Dependent Variable: OA				

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa data tersebut semua variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai Tolerance lebih dari 0,10

sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini tidak terjadi masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengelolaan data pengujian heteroskedastisitas ditentukan berdasarkan uji

glejser yaitu probabilitas signifikansinya diatas 5%. Adapun output dari uji heteroskedastisitas, antara lain :

Tabel 4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Model	Sig	Keterangan
1	(Constant)	,569	
	EP	,923	Tidak terjadi heterokedastisitas
	SPI	,212	Tidak terjadi heterokedastisitas
	NWTP	,064	Tidak terjadi heterokedastisitas
	PKD	,110	Tidak terjadi heterokedastisitas
a. Dependent Variable: abs_res			

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan variabel dalam penelitian ini tidak ada yang signifikan, yang ditunjukan dengan tingkat probabilitas signifikan diatas 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Dalam penelitian ini uji autokorelasi dengan menggunakan runt test. Adapun output dari uji Autokorelasi, antara lain :

Tabel 5
Uji Autokorelasi

Runs Test	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,04961
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	6
Total Cases	11
Number of Runs	5
Z	-,612
Asymp. Sig. (2-tailed)	,540
a. Median	

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai sig lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan pengujian regresi linier berganda dilakukan dengan pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 25 yang diformulasikan dengan persamaan model regresi sebagai berikut :

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 6
Hasil Uji T

Coefficients ^a				
Model	T tabel	T hitung	Sig.	Keterangan
(Constant)		2,078	,083	
EP	2,365	3,092	,021	Berpengaruh signifikan
SPI	2,365	-1,383	,216	Tidak berpengaruh signifikan
NWTP	2,365	4,169	,006	Berpengaruh signifikan
PKD	2,365	-1,956	,098	Tidak berpengaruh signifikan

Dependent Variable: OA

Sumber : Data Olahan, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa variabel *pressure* yang diproksikan dengan *external pressure* dan variabel rasionalisasi yang diproksikan dengan opini BPK selain WTP menghasilkan hasil berpengaruh signifikan terhadap *Financial Statement Fraud* sedangkan variabel

opportunity yang diproksikan dengan kelemahan sistem pengendalian intern dilihat dari jumlah temuan SPI dan variabel kapabilitas yang diproksikan dengan pergantian kepala daerah menghasilkan hasil tidak berpengaruh signifikan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8
Hasil Uji R^2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,930 ^a	,864	,774	,717
a. Predictors: (Constant), PKD, NWTP, SPI, EP				

Sumber : data olahan, 2019

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R²* sebesar 0,774 atau 77,4% yang berarti menunjukkan bahwa variabel bebas yaitu *Financial Statement Fraud* mampu menjelaskan variabel terikat yaitu *external pressure*, *opportunity*, *capability*, dan rasionalisasi sekitar 86,4% sedangkan sisanya 13,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda dengan SPSS versi 25 untuk menunjukkan bahwa *Financial Statement Fraud* yang diproksikan dengan opini BPK dipengaruhi oleh adanya tekanan eksternal yang mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat menghadapi kesulitan untuk membayar kembali kewajiban yang dimilikinya dan opini BPK selain Wajar Tanpa Pengecualian mengindikasikan bahwa pemerintah daerah menganggap opini yang diberikan sebagai sikap tolerir dari auditor kepada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah menganggap kesalahan yang dilakukannya dalam laporan keuangan daerah tersebut tidaklah salah.

External Pressure Berpengaruh Terhadap Financial Statement Fraud.

External pressure memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Statement Fraud* provinsi Kalimantan Barat, berarti h_0 ditolak dan h_1 diterima. Maka dari itu, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisya, *et al* (2016) dan Pamungkas (2018) yang menjelaskan bahwa *external pressure* tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Namun, penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yesiariani dan Rahayu (2017) dan Sihombing (2014) yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan.

External pressure yang dihitung dengan rasio total kewajiban terhadap total aset memengaruhi potensi adanya *Financial Statement Fraud* Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dikarenakan setiap ada penambahan rasio pada total kewajiban terhadap total aset akan menaikkan risiko terjadinya kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebab Pemerintah Daerah tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan kewajibannya sehingga menjadi tekanan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan manipulasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *External pressure* merupakan faktor terkuat bagi seseorang untuk melakukan *financial statement fraud* yang disebabkan manajemen atau sistem pemerintahan mengalami tekanan eksternal ketika memenuhi kewajibannya.

Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Berpengaruh Terhadap Financial Statement Fraud.

Faktor kesempatan menggunakan indikator kelemahan sistem pengendalian intern yang diproksikan dengan jumlah temuan SPI tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Statement Fraud* Provinsi Kalimantan Barat, berarti berarti h_0 diterima dan h_2 ditolak maka dari itu hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2018) yang menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kelemahan sistem pengendalian intern yang diproksikan dengan jumlah temuan SPI dengan kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Kelemahan sistem pengendalian intern yang diproksikan dengan jumlah temuan SPI tidak mempengaruhi *Financial Statement Fraud* Provinsi Kalimantan Barat dikarenakan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat sudah sesuai dengan

peraturan yang ada dan sudah dilakukan dengan baik, sehingga jumlah temuan SPI pada laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2007-2017 semakin berkurang yang mengindikasikan mampunya sistem pengendalian intern di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mencegah terjadinya *Financial Statemet Fraud* Pemerintah Daerah.

Opini BPK Selain WTP Berpengaruh Terhadap *Financial Statement Fraud*.

Faktor rasionalisasi yang diproksikan dengan opini BPK selain WTP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Statemet Fraud* Provinsi Kalimantan Barat, berarti berarti h_0 ditolak dan h_3 diterima maka dari itu hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2018) yang menghasilkan hasil penelitian bahwa opini BPK selain WTP tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Opini BPK selain WTP memiliki pengaruh signifikan terhadap *Financial Statemet Fraud*, karena berdasarkan opini yang diberikan oleh auditor kepada pemerintah daerah berdasarkan dari kondisi laporan keuangan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Mendapatkan opini selain WTP akan menjadikan Pemerintah Daerah membenarkan segala cara seperti memanipulasi laporan keuangan yang dibuat agar mendapatkan opini WTP.

Apabila pemerintah daerah mendapatkan opini selain WTP akan memberikan tanggapan yang negatif dari masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan terhadap informasi mengenai Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Sehingga untuk mendapatkan opini WTP tersebut, pemerintah daerah akan menganggap melakukan manipulasi atau kecurangan pada laporan keuangan itu merupakan hal yang wajar dan tidak salah.

Pergantian Kepala Daerah Berpengaruh Terhadap *Financial Statement Fraud*.

Faktor kapabilitas yang diproksikan dengan pergantian kepala daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Financial Statemet Fraud*, berarti berarti h_0 diterima dan h_4 ditolak maka dari itu hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2018) menghasilkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pergantian kepala daerah dengan kecurangan laporan keuangan. Hal ini bertentangan dengan teori yang ada dimana dikatakan bahwa kemampuan dari individu yang dalam hal ini peneliti

proksikan dengan pergantian kepala daerah memiliki pengaruh terhadap terjadinya *Financial Statemet Fraud*.

Pergantian kepala daerah yang terjadinya di Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dilakukan bukan karena ingin menutupi adanya suatu kecurangan, namun itu merupakan hal yang wajar adanya pergantian kepala daerah yang dilakukan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung setelah masa jabatannya habis. Adanya pergantian kepala daerah juga dapat memberikan dampak yang baik dengan memilih kepala daerah yang lebih berkompeten sehingga dapat bekerja sama dengan inspektorat untuk mencegah terjadinya *Financial Statemet Fraud*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. *External pressure* berpengaruh signifikan terhadap *Financial Statement Fraud* Provinsi Kalimantan Barat, jadi total kewajiban yang dimiliki akan memberikan tekanan kepada pemerintah daerah untuk menemukan cara agar bisa mengembalikan kembali kewajiban tersebut.
2. Kelemahan sistem pengendalian intern yang diproksikan dengan jumlah temuan SPI tidak berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* Provinsi Kalimantan Barat, jadi semakin baik sistem pengendalian intern yang dilakukan maka temuan yang ada pada laporan keuangan dapat dicegah terjadi kecurangan dan dapat mengurangi terjadinya kecurangan laporan keuangan.
3. Opini BPK selain WTP berpengaruh signifikan terhadap *Financial Statement Fraud* Provinsi Kalimantan Barat, jadi apabila pemerintah daerah mendapat opini selain WTP pada laporan keuangannya maka pemerintah daerah akan melakukan berbagai cara sekalipun cara tersebut salah agar mendapatkan opini WTP.
4. Pergantian kepala daerah tidak berpengaruh terhadap *Financial Statement Fraud* Provinsi Kalimantan Barat, jadi apabila ada pergantian kepala daerah itu juga akan memberikan dampak yang baik dengan terpilihnya kepala daerah yang berkompeten sehingga dapat bekerja sama dengan inspektorat untuk mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan.
5. *External Pressure*, Kelemahan SPI, Opini Selain WTP dan Pergantian Kepala Daerah secara

bersama-sama berpengaruh positif terhadap *Financial Statement Fraud* Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga apabila seluruh variabel tersebut dapat dicegah dan diminimalisir untuk suatu kesalahan terjadi maka kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat diminimalisir untuk dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, Ak. MM, CFE. (2004). Pencegahan dan Pendeteksian Kecurangan Oleh Internal Auditor
- Andilala. (2017). Pontianak Peringkat Kedua Indeks Persepsi Korupsi Selndonesia. [Online] tersedia : <http://kalbar.antaranews.com/berita/357769/pontianak-peringkat-kedua-indeks-persepsi-korupsi-se-indonesia> (24 Mei 2019)
- Annisya, Mafiana., et all. (2016). "Pendeteksian Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Fraud Diamond". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, Maret 2016, Hal. 72 – 89.
- Charles, Nenyiaba Ile dan Okoye Emma. (2015). "Evaluation of Key Determinants of Fraud Free Financial Report: a Focus on Nigeria". *Business and Management Studies*, Vol.1, No.2.
- Hariyanto, Ibnu. (2017). ICW : Dalam 6 Bulan, 226 Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp 1,83 T. [Online] tersedia : <http://m.detik.com/news/berita/d-3621894/icwdalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183-t> (24 Mei 2019)
- Indriani, Poppy dan M. Titan Terzaghi. (2017). "Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan". *I-Finance* Vol. 3. No. 2.
- Jensen, Michael C. Dan William H. Meckling. (1976). "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Liana, Lie. (2009). "Penggunaan MRA dengan SPSS untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating terhadap Hubungan antara Variabel Independen dan Variabel Dependen". *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 14(2), h: 90-97.
- Pamungkas, Ridwan Putra. (2018). "Deteksi Kecurangan Pelaporan Keuangan Dengan Teori Fraud Diamond Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Skripsi. Bandar Lampung : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Purwanto, Edy., et all. (2017). "Kajian Konsep Diamond Fraud Theory Dalam Menunjang Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Di Pemerintah Kota Bogor". *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol.17 No.3.
- Puspitadewi, Esterine dan Partogian Sormin. (2016). "Pengaruh Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016)". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12 No. 2, Hal. 146-162.
- Ramamoorti, Sridhar. (2008). "The Psychology and Sociology of Fraud: Integrating the Behavioral Sciences Component Into Fraud and Forensic Accounting Curricula". *Issues In Accounting Education* Vol. 23 No.4, Hal. 521-533.
- Riyani, Yani., et all. (2017). "Analisis Pengaruh Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Tingkat Accounting Irregularities". *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 6 No.2, Hal. 167-184.
- Sihombing, Kennedy Samuel. (2014). "Analisis Fraud Diamond Dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud : Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2012". Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Skousen, C.J dan Brady James Twedt. (2009). "Fraud in Emerging Markets: A Cross Country Analysis". [Online] tersedia : <http://ssrn.com/abstract=1340586> (10 Juni 2019)
- Skousen, C.J., et al. (2009). "Detecting and Predecting Financial Statement Fraud: The Effectiveness of the Fraud Triangle and SAS No. 99. Corporate Governance and Firm Performance Advances in Financial Economic". Vol. 13, h. 53-81.

- Skousen, C.J., et al. (2008). "Detecting And Predicting Financial Statement Fraud: The Effectiveness Of The Fraud Triangle And SAS No. 99". [Online] tersedia : <http://ssrn.com/abstract=1295494> (10 Juni 2019)
- Sugiyono. (2017). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D". Bandung : Alfabeta
- Sukanto, Imam. (2019). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Jadi 38 Poin. [Online] tersedia : <http://nasional.tempo.co/read/1170330/indekspersepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-jadi-38-poin/full?view=ok> (24 Mei 2019)
- Sukirman dan Shofia Nur Inayanti. (2016). "The Effect of Factors in Fraud Diamond Perspective on Fraudulent Financial Reporting". *Accounting Analysis Journal* Vol. 5 No. 3.
- Tuidano, Epafra, dkk. (2017). *Pengawasan Inspektorat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Ternate*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Wicaksono, Adhi. (2019). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Masih Kalah dari Malaysia. [Online] tersedia : <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20190129215750-12-364895/indekspersepsi-korupsi-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia> (24 Mei 2019)
- Wolfe, D.T. dan Dana R. Hermanson. (2004). "The Fraud Diamond: Considering the four Elements of Fraud". *The CPA Journal*, 74(12): 38–42.
- Yesiariani, Merissa dan Isti Rahayu. (2017). "Deteksi Financial Statement Fraud: Pengujian Dengan Fraud Diamond". *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*.